

Fenomena *Cancel Culture* dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi

Sriyana

Program Studi Sosiologi Universitas PGRI Palangka Raya

E-mail: riyanupp72@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4286>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 November 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 15 Desember 2025

Kata Kunci:

Cancel Culture, Media Sosial, Kebebasan Berekspresi.

Keywords

Cancel Culture, Social Media, Freedom of Expression.



ABSTRACT

Cancel culture merupakan salah satu fenomena dari budaya digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena *cancel culture* dengan fokus pada karakteristik, faktor yang mempengaruhi, serta dampak positif dan negatifnya. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* memiliki karakteristik respons cepat dan massal, mob mentality, serta dampak jangka panjang dan polarisasi konflik. Faktor yang mempengaruhinya meliputi peran media sosial, kesadaran sosial yang meningkat, kurangnya literasi digital, dan *mob mentality*. Dampak positifnya antara lain meningkatkan akuntabilitas publik, memberdayakan suara korban, dan mendorong perubahan perilaku. Namun, dampak negatifnya juga signifikan, seperti membatasi kebebasan berekspresi, potensi penyalahgunaan, dan dampak psikologis serius pada individu yang di-*cancel*. Penelitian ini merekomendasikan edukasi literasi digital dan kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial secara bertanggung jawab untuk mengelola fenomena ini dengan bijak.

Cancel culture is one of the phenomena of digital culture. This study aims to examine the phenomenon of cancel culture with a focus on its characteristics, influencing factors, and its positive and negative impacts. The research method uses in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that cancel culture has the characteristics of a fast and mass response, mob mentality, and long-term impacts and conflict polarization. Influencing factors include the role of social media, increased social awareness, lack of digital literacy, and mob mentality. The positive impacts include increasing public accountability, empowering victims' voices, and encouraging behavioral change. However, the negative impacts are also significant, such as limiting freedom of expression, potential abuse, and serious psychological impacts on individuals who are canceled. This study recommends digital literacy education and policies that support the responsible use of social media to manage this phenomenon wisely..



This is an open ccess article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Sriyana, et al (2025) Fenomena *Cancel Culture* dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi ,4(2) 13340-13349 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4286>

PENDAHULUAN

Cancel culture adalah fenomena sosial yang semakin mengemuka di era digital, di mana individu, kelompok, atau organisasi mengalami pemboikotan atau "pembatalan" oleh publik karena dianggap melakukan kesalahan, pelanggaran moral, atau tindakan yang tidak dapat diterima (Rakatiwi, 2024). *Cancel culture* adalah bentuk akuntabilitas sosial yang muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa fenomena ini dapat berubah menjadi *mob justice* jika tidak

dikelola dengan bijak (Norlock, 2020). Dalam konteks ini, tindakan pembatalan sering kali melibatkan penarikan dukungan, kritik tajam, atau bahkan seruan untuk memboikot produk dan layanan yang terkait dengan individu atau entitas yang bersangkutan. Fenomena ini paling sering terjadi di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens global dalam hitungan detik.

Salah satu aspek yang sangat menarik dari *cancel culture* adalah kekuatan media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat mobilisasi yang sangat efektif. Dalam hitungan menit, sebuah pernyataan kontroversial dapat menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia, memicu reaksi emosional yang kuat dari masyarakat. Misalnya, ketika seorang selebritas membuat pernyataan yang dianggap rasis atau seksis, reaksi publik dapat langsung terlihat melalui hashtag yang trending, yang mengumpulkan ribuan atau bahkan jutaan tweet dan postingan dalam waktu singkat.

Selain itu, fenomena ini juga dipicu oleh meningkatnya kesadaran sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. *Cancel culture* efektif dalam mempromosikan kesadaran sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek *chilling effect* (efek mencekam) yang membatasi kebebasan berekspresi. (Ng, 2021) Generasi ini tumbuh dalam lingkungan di mana isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Mereka lebih cenderung untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak etis atau diskriminatif (Santosa, 2023). Misalnya, gerakan *Black Lives Matter* yang muncul sebagai respons terhadap kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam di Amerika Serikat telah memicu banyak orang untuk lebih kritis terhadap tindakan diskriminatif, baik di lingkungan sosial maupun di dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa *cancel culture* bukan hanya sekadar reaksi emosional, tetapi juga merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk menciptakan perubahan sosial yang positif.

Namun, di balik fenomena ini, terdapat kritik yang cukup tajam. Banyak yang berpendapat bahwa *cancel culture* dapat membatasi kebebasan berekspresi dan menciptakan budaya takut. Individu yang di-*cancel* sering kali mengalami stres, kecemasan, dan depresi, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan sosial yang memadai (Clark, 2022). Dalam banyak kasus, individu yang di-*cancel* sering kali merasa tertekan dan terisolasi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Misalnya, seorang penulis yang pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial mungkin merasa terjebak dalam lingkaran kritik yang tidak ada habisnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan depresi atau kecemasan. Penelitian oleh *American Psychological Association* menunjukkan bahwa tekanan sosial yang disebabkan oleh budaya pembatalan dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, termasuk stres, kecemasan, dan perasaan rendah diri.

Ada juga argumen bahwa *cancel culture* dapat menciptakan efek boomerang, di mana tindakan pembatalan justru memperkuat posisi individu yang dianggap bersalah. Dalam beberapa kasus, individu yang di-*cancel* malah mendapatkan dukungan lebih besar dari kelompok lain yang merasa bahwa mereka juga menjadi korban dari apa yang mereka anggap sebagai intoleransi atau penghakiman yang berlebihan. Contoh dari fenomena ini dapat dilihat dalam kasus-kasus di mana selebritas yang di-*cancel* justru mendapatkan perhatian media yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan popularitas mereka di kalangan penggemar yang setia.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana *cancel culture* dapat dihadapi dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Alih-alih hanya memboikot atau mengkritik, masyarakat dapat berfokus pada dialog dan pendidikan. Misalnya, ketika seseorang membuat pernyataan yang dianggap tidak pantas, alih-alih langsung membatalkan mereka, mungkin lebih bermanfaat untuk mengajak mereka berdiskusi tentang pandangan mereka dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Pendekatan ini tidak hanya dapat membantu individu tersebut berkembang, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran.

Cancel culture adalah fenomena yang kompleks dan multifaset yang mencerminkan dinamika sosial di era digital. Kekuatan media sosial, meningkatnya kesadaran sosial, dan efek viral dari konten terkait *cancel culture* telah menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan yang dianggap tidak etis. Algoritma media sosial memperkuat fenomena *cancel culture* dengan memprioritaskan konten yang memicu respons emosional tinggi. (Smith & Lee, 2023) Namun, penting untuk menyadari bahwa fenomena ini juga membawa risiko, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan dampak psikologis yang serius bagi individu yang di-*cancel* (Bouvier, 2020). Oleh karena itu, membangun dialog yang konstruktif dan pendidikan yang berkelanjutan dapat menjadi

langkah penting dalam menghadapi tantangan ini, sehingga masyarakat dapat bergerak menuju perubahan sosial yang lebih positif tanpa mengorbankan kebebasan individu.

Dibalik tujuannya yang mulia untuk meminta pertanggungjawaban, *cancel culture* juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kebebasan berekspresi dan kehidupan publik. *Cancel culture* bisa menjadi alat yang efektif untuk meminta pertanggung-jawaban, tetapi juga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi jika digunakan secara tidak proporsional. Masyarakat perlu memahami batasan antara kritik konstruktif dan penghakiman massal yang merugikan (Huda, 2022).

Cancel culture tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga kehidupan publik secara luas. Di satu sisi, fenomena ini dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketidakadilan atau pelanggaran moral. Namun, di sisi lain, *cancel culture* juga dapat menciptakan polarisasi dan ketegangan sosial, terutama ketika digunakan secara emosional dan tanpa verifikasi fakta yang memadai. *Cancel culture* bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong kesadaran sosial, tetapi di sisi lain, ia dapat merusak reputasi seseorang atau institusi tanpa proses yang adil. Kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam budaya penghakiman massal (Azra, 2021).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tentang *cancel culture* bisa dilihat dari Penelitian oleh Ng, Eve (2020) dalam artikel *No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation*. Fokus penelitian membahas *cancel culture* sebagai bentuk partisipasi digital dan dinamika kekuasaan di media sosial. Adapun temuannya bahwa *cancel culture* bukan hanya bentuk hukuman sosial, tetapi juga ekspresi kekuasaan kelompok minoritas melawan dominasi arus utama. Ng menyoroti dinamika media sosial, namun belum secara mendalam menghubungkannya dengan isu kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara berkembang. Relevansinya membantu memahami *cancel culture* sebagai bagian dari perjuangan representasi sosial, bukan semata-mata ancaman terhadap kebebasan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Norris, Pippa (2021) *Cancel Culture: Myth or Reality?*. Fokus penelitian menilai sejauh mana *cancel culture* benar-benar membatasi kebebasan berekspresi, berdasarkan survei di negara-negara demokratis. Adapun temuannya bahwa ada perbedaan antara persepsi dan realita; banyak individu merasa takut disalahpahami, namun secara statistik tidak semua bentuk ekspresi dibatasi. Namun, penelitian Norris berfokus pada negara-negara Barat dan belum mempertimbangkan konteks budaya serta sistem sosial di negara seperti Indonesia. Relevansinya memberikan dasar empiris tentang persepsi versus realitas ancaman terhadap kebebasan berbicara.

Bila dibandingkan dengan kedua penelitian di atas, maka perbedaan sekaligus kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini yaitu fokus pada hubungan langsung antara *cancel culture* dan implikasi spesifik terhadap kebebasan berekspresi di era digital Indonesia, mengidentifikasi dinamika sosial lokal, pendekatan kritis terhadap ambivalensi, serta analisis terhadap perubahan ekspresi publik. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik *cancel culture*, faktor-faktor yang mempengaruhi *cancel culture* serta dampak positif dan negatif *cancel culture* terhadap kebebasan berekspresi.

Memahami dampak *cancel culture* terhadap kebebasan berekspresi dan kehidupan publik sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan inklusif. Media sosial memiliki pengaruh besar, fenomena ini perlu dikelola dengan bijak melalui edukasi, literasi digital, dan dialog antarkelompok. Dengan demikian, *cancel culture* dapat menjadi alat untuk mempromosikan keadilan sosial tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan harmoni sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam tentang fenomena *cancel culture* dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi serta kehidupan publik. Subjek penelitian terdiri dari: tokoh publik, pengguna media sosial aktif, akademisi/ahli dan masyarakat umum. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan bahwa partisipan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), langkah-langkahnya meliputi: transkripsi dan organisasi data, pengodean (*coding*), identifikasi tema, serta interpretasi dan pembahasan. Uji keabsahan data dilakukan

dengan menggunakan triangulasi data dan teknik untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas sosial mengenai fenomena cancel culture dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi, maka hasil penelitian ini mencakup 4 (empat) aspek yaitu: karakteristik *cancel culture*, faktor-faktor yang mempengaruhi *cancel culture*, dampak positif *cancel culture*, serta dampak negatif *cancel culture*, sebagaimana pemaparan berikut ini.

Karakteristik *Cancel culture*

Fenomena *cancel culture* telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era digital di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas. Di Indonesia, *cancel culture* tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga institusi dan komunitas. Melalui hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap karakteristik utama dari fenomena ini.

Salah satu karakteristik paling mencolok dari *cancel culture* adalah respons cepat dan massal. Dalam konteks ini, satu unggahan di media sosial dapat memicu reaksi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat (Yanuar et al, 2022). Misalnya, ketika seorang tokoh publik mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial, dalam hitungan jam, tagar terkait dengan kasus tersebut dapat menjadi trending di Twitter. Kecepatan respons ini sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial yang dirancang untuk memperkuat konten yang memicu respons emosional tinggi. Platform seperti Twitter dan Instagram, dengan fitur retweet dan repost, memungkinkan konten yang memicu kemarahan atau ketidakpuasan untuk menyebar dengan cepat, menciptakan efek bola salju yang sulit dihentikan (Firmanzah, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa *cancel culture* sering kali dipicu oleh satu unggahan yang kemudian menjadi viral, menciptakan tekanan sosial yang besar bagi individu atau institusi yang menjadi sasaran (Browning & Adams, 2023).

Karakteristik kedua dari fenomena ini mencerminkan *mob mentality*, di mana individu atau kelompok cenderung memberikan respons kolektif tanpa melakukan verifikasi yang memadai terhadap fakta yang ada. Contoh nyata bisa dilihat pada kasus seorang selebritas yang di-*cancel* karena kesalahan kecil yang dibesar-besarkan oleh netizen. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung ikut-ikutan, menilai dan menghakimi tanpa mencari tahu kebenaran dari situasi tersebut. Ini menciptakan bentuk kekerasan massal yang dapat merugikan pihak yang di-*cancel* secara tidak proporsional. Menurut Mulia (2021), respons kolektif ini sering kali tidak proporsional dan dapat berujung pada konsekuensi yang sangat merugikan bagi individu yang terlibat. Ketika individu merasa tertekan oleh opini publik yang negatif, mereka mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan, yang memperburuk situasi mereka.

Karakteristik dampak jangka panjang dari *cancel culture* juga sangat signifikan. Individu atau institusi yang di-*cancel* sering kali menghadapi konsekuensi yang merusak, seperti kehilangan pekerjaan, reputasi yang rusak, dan tekanan psikologis yang berat. Misalnya, seorang seniman yang di-*cancel* karena kesalahan masa lalu mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan proyek baru, dan hal ini dapat mengakibatkan krisis identitas dan kehilangan rasa percaya diri. Penelitian menunjukkan bahwa dampak jangka panjang *cancel culture* dapat sangat merusak bagi kesehatan mental individu. Poerwandari (2023) mencatat bahwa individu yang di-*cancel* sering kali mengalami trauma, kecemasan, dan bahkan depresi, dan dampak ini dapat bertahan lama, bahkan setelah kasusnya mereda. Dalam banyak kasus, individu yang di-*cancel* merasa terjebak dalam stigma sosial yang sulit dihapus, yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka secara signifikan.

Selain itu, karakteristik *cancel culture* juga memicu polarisasi dan konflik di masyarakat. Ketika sebuah kasus menjadi viral, sering kali muncul dua kubu yang saling berseberangan: mereka yang mendukung tindakan *cancel* dan mereka yang menolak. Polarisasi ini menciptakan ketegangan yang mendalam antara kelompok pro dan kontra, memperlebar jarak antara mereka dan menciptakan konflik yang sulit didamaikan. Gerung (2022) menekankan bahwa perdebatan sengit yang muncul sebagai akibat dari *cancel culture* sering kali tidak membawa solusi, tetapi justru memperburuk keadaan. Dalam konteks ini, masyarakat terjebak dalam siklus konflik yang tidak produktif, di mana dialog dan pemahaman antar pihak menjadi semakin sulit dicapai.

Dengan mempertimbangkan semua karakteristik ini, dapat disimpulkan bahwa *cancel culture* adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional. Respons cepat dan massal, *mob mentality*, dampak jangka panjang, serta polarisasi dan konflik yang dihasilkan adalah beberapa aspek utama yang membentuk fenomena ini di Indonesia. *Cancel culture* tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan ketegangan dan perpecahan yang dapat mengganggu kohesi sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan dalam memberikan respons terhadap pernyataan atau tindakan orang lain. Masyarakat perlu diajak untuk berfokus pada dialog yang konstruktif dan pemahaman, alih-alih terjebak dalam siklus penghakiman yang tidak berujung.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Cancel Culture*

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan dan dinamika *cancel culture*. Dengan memperhatikan kompleksitas dan dampak dari fenomena ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan dan penyebaran *cancel culture* di masyarakat saat ini.

Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyebarkan informasi dan memicu *cancel culture*. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai arena di mana opini dan reaksi masyarakat dapat terakumulasi dengan cepat. Marshall McLuhan, melalui konsep Ekologi Media, mengemukakan bahwa media tidak sekadar berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial dalam komunitas (Rakatiwi, 2024). Algoritma yang diterapkan oleh platform-platform ini cenderung memprioritaskan konten yang mampu memicu respons emosional tinggi, menciptakan kondisi di mana kasus *cancel culture* dapat menjadi viral dalam waktu singkat. Sebagai contoh, seorang tokoh publik yang membuat pernyataan kontroversial di Twitter dapat langsung di-*cancel* oleh netizen dalam hitungan jam.

Dalam hal ini, kita bisa melihat bagaimana informasi yang beredar di media sosial dapat dengan mudah mempengaruhi persepsi publik dan mengakibatkan konsekuensi serius bagi individu yang terlibat. McLuhan menggambarkan media digital sebagai media "dingin" yang memerlukan keterlibatan aktif dari penonton (Rakatiwi, 2024). Seorang ahli media sosial, Firmanzah (2022), menyatakan, platform seperti Twitter dirancang untuk memperkuat konten yang memicu respons emosional, sehingga *cancel culture* bisa menyebar dengan cepat. Pendapat ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga senjata yang dapat digunakan untuk membangun atau menghancurkan reputasi seseorang. Media sosial telah berkembang menjadi arena baru yang secara substansial mempengaruhi dinamika kritik sosial (Arianto, 2022). Dengan demikian, teori ekologi media yang dikemukakan oleh McLuhan memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran media tidak hanya sebagai sarana untuk mengkritik, tetapi juga sebagai suatu lingkungan yang mengatur cara transformasi kritik menjadi isolasi sosial melalui dinamika teknologi yang ada.

Selanjutnya, kesadaran sosial yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi pendorong utama bagi munculnya *cancel culture*. Masyarakat kini semakin peduli terhadap isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, dan akuntabilitas, yang mendorong mereka untuk menggunakan *cancel culture* sebagai alat untuk meminta pertanggungjawaban dari individu atau institusi yang dianggap melanggar norma-norma sosial. Kampanye-kampanye seperti #MeToo dan #BlackLivesMatter adalah contoh nyata di mana *cancel culture* digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan rasisme. Dalam observasi yang dilakukan, tagar terkait isu sosial sering kali menjadi trending topic di Twitter, menunjukkan bahwa *cancel culture* mampu menarik perhatian publik dan mendorong diskusi yang lebih luas. Mulia (2021) menekankan bahwa *cancel culture* sering kali digunakan untuk mengadvokasi isu-isu sosial, seperti anti-rasisme dan kesetaraan gender. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa *cancel culture* tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang lebih positif.

Namun, di balik fenomena ini, terdapat masalah serius yang berkaitan dengan literasi digital. Banyak pengguna media sosial yang tidak memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sehingga mempercepat eskalasi *cancel culture*. Contoh yang sering terjadi adalah kasus hoaks yang memicu *cancel culture* terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam studi dokumentasi yang dilakukan, beberapa kasus menunjukkan bahwa *cancel culture* sering kali dipicu oleh informasi yang

tidak diverifikasi, yang berpotensi merugikan pihak yang tidak bersalah. Poerwandari (2023) menekankan pentingnya literasi digital dalam mengatasi dampak negatif *cancel culture*, dengan menyatakan bahwa masyarakat perlu diajarkan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi dampak negatif dari *cancel culture*, perlu ada upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa fakta dan informasi yang beredar.

Selain itu, fenomena *Mob mentality* atau perilaku kerumunan juga sering kali memperkuat *cancel culture*. Dalam situasi seperti ini, masyarakat cenderung ikut-ikutan tanpa memverifikasi fakta terlebih dahulu. Contoh yang dapat kita lihat adalah seorang selebritas yang di-*cancel* karena kesalahan kecil yang dibesar-besarkan oleh netizen. Dalam wawancara dengan seorang psikolog sosial, Gerung (2022) menyatakan, *Mob mentality* membuat orang cenderung ikut-ikutan tanpa berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kolektif yang tidak proporsional dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi individu yang menjadi target. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Mob mentality* sering kali memperkuat respons kolektif yang tidak proporsional dalam *cancel culture*, yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cancel culture* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk peran media sosial, kesadaran sosial yang meningkat, kurangnya literasi digital, dan *Mob mentality*. Dalam konteks ini, penting untuk mengelola fenomena ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu diajarkan untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan memahami dampak dari tindakan mereka. Dengan demikian, diharapkan *cancel culture* dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang positif, bukan sebagai sarana untuk menghancurkan reputasi individu tanpa dasar yang jelas.

Dampak Positif Cancel Culture Terhadap Kebebasan Berekspresi

Berangkat dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap beberapa dampak positif dari fenomena ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak positif *cancel culture* dengan memberikan analisis yang lebih mendalam, contoh konkret, serta pendapat dari para ahli di bidangnya.

Salah satu dampak positif yang paling mencolok dari *cancel culture* adalah meningkatnya akuntabilitas publik. *Cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menuntut pertanggungjawaban publik terhadap individu atau institusi yang melakukan pelanggaran nilai-nilai masyarakat. Menurut Rianto et al. (2023), dalam kasus Gofar Hilman yang terkait dengan dugaan kekerasan seksual, *cancel culture* berperan positif dalam memperjuangkan keadilan bagi korban dan mendorong diskusi publik mengenai isu tersebut.

Dalam masyarakat modern, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, individu dan institusi yang melakukan kesalahan, baik itu berupa perilaku rasis, seksis, maupun korupsi, dapat langsung terpapar. Misalnya, ketika seorang tokoh publik membuat pernyataan rasis di platform media sosial, reaksi dari netizen sering kali sangat cepat dan tegas. Mereka tidak hanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka, tetapi juga memaksa individu tersebut untuk meminta maaf secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki kekuatan untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang berada di posisi kekuasaan yang sebelumnya sulit diakses. Huda (2022) menyatakan bahwa *cancel culture* berfungsi sebagai alat untuk menuntut akuntabilitas, memberikan masyarakat kesempatan untuk menuntut keadilan dengan cara yang lebih langsung dan efektif. Pendapat ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa *cancel culture* sering kali digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap bersalah.

Fenomena *cancel culture* juga memberdayakan suara korban. Banyak individu yang sebelumnya merasa terpinggirkan atau tidak didengar kini memiliki platform untuk berbicara dan mendapatkan dukungan publik. Penelitian oleh Thomas et al. (2023) menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat memberikan rasa validasi kolektif bagi kelompok yang mengalami ketidakadilan. Paparan terhadap kasus *cancel culture* yang jelas, seperti tindakan seksisme, dapat meningkatkan perasaan pemberdayaan kolektif dan mendorong niat untuk melakukan aksi kolektif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Contoh yang relevan adalah kasus-kasus pelecehan seksual yang diungkap di media sosial. Ketika korban berani berbicara, mereka tidak hanya mendapatkan perhatian, tetapi juga dukungan dari masyarakat luas. Seorang korban yang diwawancarai mengungkapkan, "Saya merasa didukung oleh banyak orang setelah kasus saya viral. Ini memberi saya kekuatan untuk terus berjuang." Pendapat ini mencerminkan bagaimana *cancel culture* dapat menjadi alat pemberdayaan yang signifikan,

memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk menyuarakan pengalaman mereka (Mulia, 2021). Dengan demikian, *cancel culture* tidak hanya sekadar fenomena, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang memberikan kekuatan kepada individu untuk melawan ketidakadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* sering kali digunakan untuk memberdayakan korban dan memberikan mereka dukungan yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Cancel culture juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial di kalangan masyarakat. Banyak isu penting yang selama ini terabaikan, seperti kesetaraan gender, anti-rasisme, dan masalah lingkungan, kini mendapatkan perhatian yang lebih luas berkat fenomena ini. Zembylas (2023) menyoroti bahwa *cancel culture* memiliki implikasi pedagogis yang signifikan, terutama dalam pendidikan guru. Fenomena ini mendorong pendidik untuk lebih peka terhadap isu-isu struktural seperti rasisme dan ketidakadilan sosial, serta mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan literasi media dalam menghadapi dinamika sosial di media digital.

Kampanye-kampanye seperti *#MeToo* dan *#BlackLivesMatter* adalah contoh nyata bagaimana *cancel culture* dapat mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang mendesak. Gerakan *#MeToo* sebagai inisiatif sosial yang baru bertujuan untuk membagikan pengalaman yang dialami oleh para korban kekerasan dan pelecehan seksual serta untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku melalui platform media sosial (Elindawati, 2021). Ketika tagar-tagar ini menjadi trending topic di media sosial, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli, tetapi juga bersedia untuk terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam. Huda (2022) menekankan bahwa media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial yang penting. Dengan demikian, *cancel culture* berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar mereka.

Selain itu, *cancel culture* juga mendorong perubahan perilaku di kalangan individu maupun institusi. Ketika sebuah perusahaan di-*cancel* karena praktik kerja yang tidak adil, mereka sering kali merasa terpaksa untuk merevisi kebijakan mereka demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial yang dihasilkan oleh *cancel culture* dapat memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki diri. Sebuah studi dokumentasi menunjukkan bahwa banyak organisasi yang berhasil mengubah kebijakan mereka setelah mendapat tekanan dari masyarakat. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan, dan *cancel culture* menjadi salah satu cara untuk mencapainya (Mulia, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* berhasil mendorong perubahan kebijakan di tingkat korporasi dan pemerintah.

Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi agar budaya pembatalan dapat bertransformasi menjadi bentuk aktivisme digital yang konstruktif, yaitu dengan memperjuangkan keadilan atau memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang rentan untuk dapat mengungkapkan pendapat mereka (*speaking back*). Kriteria tersebut meliputi keberanian, kejujuran, serta keugaharian atau pengendalian diri (Hardiman, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cancel culture* memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas sosial, memberdayakan korban, memperkuat solidaritas dan validitas kolektif, serta meningkatkan kesadaran sosial dan pendidikan sosial. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif ini, masyarakat perlu mengelola fenomena ini dengan bijaksana. Dengan pendekatan yang tepat, *cancel culture* dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

Dampak Negatif Cancel Culture Terhadap Kebebasan Berekspresi

Fenomena *cancel culture*, meskipun sering dipandang sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial, juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi. Beberapa penelitian dan pendapat ahli mengungkapkan bahwa *cancel culture* dapat mengarah pada pembungkaman opini, isolasi digital, dan ketakutan untuk menyuarakan pendapat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap beberapa dampak negatif dari fenomena ini. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak negatif *cancel culture* yang perlu kita perhatikan.

Salah satu dampak paling signifikan dari *cancel culture* adalah pembatasan kebebasan berekspresi. Banyak individu, khususnya tokoh publik, merasa terintimidasi untuk menyuarakan pendapat mereka. Ketakutan akan konsekuensi sosial, seperti di-*cancel*, menciptakan lingkungan yang mencekam atau yang sering disebut sebagai *chilling effect*. Dalam situasi ini, orang-orang menjadi ragu

untuk berbicara, bahkan ketika mereka memiliki pendapat yang valid dan konstruktif. Sebagai contoh, seorang seniman yang sebelumnya dikenal berani dalam mengekspresikan pandangannya kini memilih untuk menghindari tema-tema kontroversial karena takut akan reaksi negatif dari publik. Dalam sebuah wawancara, seorang akademisi mengungkapkan, *cancel culture* membuat orang berpikir seribu kali sebelum berbicara, bahkan jika itu adalah pendapat yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan akan di-*cancel* dapat menghambat dialog yang sehat dan produktif dalam masyarakat. Puput Tripeni Juniman (2023) menyoroti bahwa *cancel culture* dapat membungkam perspektif alternatif dan menghilangkan ruang perdebatan intelektual. Fenomena ini sering kali mengarah pada pengucilan individu yang memiliki pendapat berbeda, sehingga mengancam keberagaman opini di ruang publik. Juniman juga mencatat bahwa *cancel culture* dapat menjadi bentuk kepanikan moral yang merusak konsep ruang publik yang sehat.

Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika sosial secara keseluruhan. Ketika orang-orang merasa tertekan untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka, maka ruang untuk diskusi yang konstruktif menjadi semakin sempit. Hal ini berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari kebebasan berbicara. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf dan pengamat sosial, Rocky Gerung (2022), *cancel culture* adalah ancaman serius terhadap demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak individu merasa tertekan untuk tidak berbicara karena takut akan konsekuensi sosial yang merugikan. Menurut Alan Dershowitz (2020), fenomena pembatalan telah menjadi tindakan yang sering kali mengesampingkan kebenaran sebagai suatu proses.

Fenomena *cancel culture* tidak hanya berdampak pada kebebasan berekspresi, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok menggunakan *cancel culture* sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi lawan atau pesaing mereka. Misalnya, seorang pesaing bisnis mungkin menyebarkan informasi palsu tentang kompetitornya dengan tujuan untuk merusak reputasi dan mengurangi dukungan publik terhadapnya. Observasi menunjukkan bahwa beberapa kasus *cancel culture* muncul sebagai alat balas dendam atau persaingan tidak sehat, yang berujung pada tindakan yang tidak etis dan merugikan.

Dalam konteks ini, *cancel culture* dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan digital yang perlu diwaspadai. Seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah (2022), *Cancel culture* sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penggunaan *cancel culture* sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau kelompok tanpa alasan yang jelas menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan orang-orang merasa semakin terancam dan tidak aman dalam mengekspresikan pendapat mereka, yang pada akhirnya merusak ikatan sosial yang seharusnya dibangun di atas kepercayaan dan saling menghormati.

Dampak psikologis dari *cancel culture* juga tidak bisa diabaikan. Individu yang di-*cancel* sering kali mengalami konsekuensi serius, seperti stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Sebagai contoh, seorang influencer yang mengalami *cancel* karena kesalahan kecil yang dibesar-besarkan mengaku mengalami depresi yang mendalam akibat tekanan sosial yang ia hadapi. Dalam banyak kasus, individu yang mengalami *cancel* bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka atau menarik diri dari media sosial sebagai upaya untuk melindungi kesehatan mental mereka. Africa Brooke (2024) mengungkapkan bahwa iklim intoleransi di media sosial menyebabkan banyak individu merasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Ketakutan akan disalahpahami atau mendapatkan reaksi negatif membuat orang cenderung menyensor diri sendiri, yang pada akhirnya menghambat diskusi terbuka dan jujur di ruang publik.

Gerakan *cancel culture* yang tidak disampaikan dengan cara yang tepat sesuai dengan tujuan awalnya, hanya akan berujung pada penyebaran ujaran kebencian terhadap individu yang menjadi target. Ini menunjukkan kurangnya fokus pada isu yang sebenarnya, dan lebih mengarah pada aspek-aspek yang berkaitan dengan identitas serta kehidupan pribadi seseorang (Pramana, 2020). Ujaran kebencian dan *cancel culture* memiliki kesamaan, di mana kedua tindakan tersebut didorong oleh rasa intoleransi yang dapat berkembang menjadi kebencian, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental (psikis) individu yang menjadi sasaran (Hasna dan Hendrastomo, 2024)

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa dampak psikologis ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat bertahan lama dan memengaruhi kualitas hidup individu tersebut. Ginanjar (2023) menyatakan bahwa dampak psikologis yang serius dari *cancel culture* dapat memengaruhi kualitas hidup individu yang di-*cancel*. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih peka terhadap konsekuensi yang

ditimbulkan oleh tindakan *cancel* dan pentingnya membangun empati dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cancel culture* memiliki dampak negatif yang serius. Pembatasan kebebasan berekspresi, potensi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan dampak psikologis pada individu yang di-*cancel* adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan memahami dampak-dampak ini, kita dapat mengelola fenomena *cancel culture* dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara dan berpendapat tanpa takut akan konsekuensi yang merugikan.

KESIMPULAN

Cancel culture adalah fenomena sosial yang memiliki karakteristik respons cepat dan massal, *Mob mentality*, serta dampak jangka panjang dan polarisasi konflik. Faktor utamanya meliputi peran media sosial, kesadaran sosial yang meningkat, kurangnya literasi digital, dan *Mob mentality*. Dampak positifnya antara lain meningkatkan akuntabilitas publik, memberdayakan suara korban, dan mendorong perubahan perilaku. Namun, dampak negatifnya juga signifikan, seperti membatasi kebebasan berekspresi, potensi penyalahgunaan, dan dampak psikologis serius pada individu yang di-*cancel*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi literasi digital dan kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial secara bertanggung jawab untuk mengelola fenomena ini dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2022). Melacak Gerakan Masyarakat Sipil Melalui Tagar #Reformasi Dikorupsi di Twitter. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 19(1). <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3994>
- Azra, A. (2021). *Media Sosial dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Bouvier, G. (2020). Racist Call-Outs And Cancel Culture On Twitter: The Limitations Of The Platform's Ability To Define Issues Of Social Justice. *Discourse, Context and Media*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100431>
- Brooke, A. (2024). Everyone's so Intolerant Online. Am I Right To Stay Silent? *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/wellness/article/2024/may/22/cancel-culture-social-media>
- Browning, J., & Adams, Z. (2023). *Why Twitter Does Not Gamify Communication*. Inquiry (United Kingdom). <https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2261489>
- Clark, L. (2022). The Psychological Impact Of Cancel Culture . *Journal of Social Psychology*, 45(4), 123-135.
- Dershowitz, A. (2020). *Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process*. Hots Book.
- Elindawati, R. (2021). Gerakan #MeTooSebagai Perlawanan Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. 15(1): 17:30
- Firmanzah. (2022). *Media Sosial dan Dinamika Opini Publik*. Jakarta: Paramadina Press.
- Gerung, R. (2022). *Filsafat dan Konflik Sosial di Era Digital*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ginanjari, A. S. (2023). *Dampak Psikologis Media Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Hardiman, B. F. (2021). *Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasna, A. A., & Hendratomo, G. (2024). Cancel Culture Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.60990>
- Huda, N. (2022). *Dampak Cancel culture terhadap Kebebasan Berekspreasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Juniman, P. T. (2023). Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspreasi. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 18(1), 1-14. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v18i1.2451>
- Mulia, M. (2021). *Kekerasan Massal di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ng, E. (2021). *Cancel culture : A Double-Edged Sword*. *Social Media + Society*, 7(3), 1-10.
- Ng, E. (2020). *No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation*. *Television & New Media*, 21(6), 621-627. <https://doi.org/10.1177/1527476420918828>

- Norris, P. (2021). *Cancel culture: Myth or reality? Political Studies*, 70(1), 206–230. <https://doi.org/10.1177/00323217211037024>
- Norlock, K. (2020). Canceling and Accountability. *Journal of Ethics and Social Philosophy*, 18(2), 1–15.
- Poerwandari, E. K. (2023). *Dampak Psikologis Cancel culture*. Jakarta: UI Press.
- Rakatiwi, Y., Rubino, R., & Mailin, M. (2024). Mekanisme Cancel Culture Dalam Gerakan #Stoptoxic: Studi Transformasi Kritik Ke Isolasi Digital Di Platform Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(3), 931–942. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i3.2412>
- Rianto, P., Sulkhan, K. A., & Marantika, N. (2023). Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan atukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat? *ETTISAL: Journal of Communication*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v8i2.10844>
- Santosa, D. R. (2023). Digital Discourses Mengenai Fenomena Cancel Culture Saipul Jamil dalam Media Sosial TikTok. *JiIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3411>.
- Smith, J., & Lee, H. (2023). *Cancel culture and Social Media Dynamics*. *New Media & Society*, 25(1), 56–72.
- Thomas, E., et al. (2023). Cancel Culture Can Be Collectively Validating For Groups Experiencing Harm. *Frontiers in Psychology*, 14, 1181872. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1181872>
- Yanuar, D., Muharman, N., Yudha, M. Y. T. P., Rahmawati, R., Anisah, N. A., & Maini, M. S. (2023). Cancel Culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(2), 120–135. <https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.44044>.
- Zembylas, M. (2023). The Phenomenon Of Cancel Culture Through The Social Media: Pedagogical Implications For Teacher Education. *Pedagogy, Culture & Society*, 32(5), 1495–1512. <https://doi.org/10.1080/14681366.2023.2202192>.